



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMRON SUANDY**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **998938**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/142 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 124.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX R01 / SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FILANO / SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 439.320.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	33.522.222
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.996.842.222
III. HUTANG	Rp.	400.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.596.842.222

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.